

# BAB I

## PENDAHULUAN

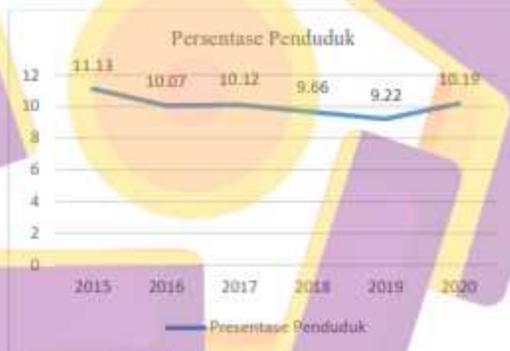
### 1.1. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan kadang kala kerap ditemui di beberapa negara, khususnya negara berkembang. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan perekonomian yang sedang dihadapi oleh beberapa negara khususnya negara Indonesia dan hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan (Sulistiyana, 2014). Masalah pengangguran, Pendidikan, kesehatan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan sehingga dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat terpisah dari masalah-masalah diatas (Romi dkk,2019). Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi (Harlik dkk,2013). Salah satu yang menjadi akar masalah mengapa kemiskinan masih terjadi tingginya disparitas antar daerah akibat adanya ketidak meratanya distribusi pendapatan sehingga menyebabkan kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya (Tisnawati, 2012).

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya yang dilihat dari rendahnya konsumsi, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah dan sebagainya (Paramita dkk, 2015). Masalah kemiskinan dalam setiap negara, baik kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif merupakan suatu masalah

yang harus segera terselesaikan, jika masalah ini tidak terselesaikan maka berimbas pada aktivitas kegiatan ekonomi yang terganggu (Aprianto dkk,2018).

Persentase penduduk miskin yang tinggi disuatu wilayah pasti akan menjadi beban bagi pembangunan, sehingga pembangunan nasional dikatakan berhasil jika sudah meminimalisir jumlah dan persentase (Siregar dkk, 2019). Tingginya persentase penduduk miskin juga mempengaruhi rendahnya daya beli masyarakat, hal ini karena pendapatan masyarakat miskin rendah sehingga pendapatan perkapita juga rendah. Pengangguran yang tinggi juga akan mengakibatkan situasi ini semakin parah (Mahmud dkk,2020). Berikut merupakan grafik persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2015-2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

**Gambar 1.1 Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2020 (%)**

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan terdapat penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia mulai tahun 2015-2019, sedangkan tahun 2020 justru mengalami kenaikan sebesar 0.97% atau 2,76 juta jiwa sehingga pada tahun 2020 tercatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,19%. Mayoritas penduduk miskin yang ada di Indonesia sebagian besar masih

terkonsentrasi di pulau jawa hingga tahun 2020, sementara itu di setiap Provinsi di Pulau Jawa ketersediaan akses dan fasilitas infrastruktur lebih lengkap. Meskipun tingkat persentase penduduk miskin di Pulau Jawa masih tinggi tetapi kontribusi Produk Domestik Bruto pulau jawa terhadap nasional hingga tahun 2020 sebesar 58,75% sementara sisanya terbagi ke-5 pulau lainnya di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (Niswati, 2014).

Pulau Jawa memiliki 6 (Enam) Provinsi diantaranya adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota, Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin, Daerah Istimewa Yogyakarta masih tertinggi hingga tahun 2020 sebesar 12,28% (Badan Pusat Statistik 2021) dan selalu berada diatas angka rata rata nasional yang mengindikasi bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi perhatian pemerintah setempat, berikut merupakan tabel persentase penduduk miskin yang ada di Pulau Jawa :

**Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2015-2020 (%)**

NO	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	D.K.I Jakarta	3,01	3,75	3,78	3,55	3,42	4,69	3,81
2	Jawa Timur	12,28	11,85	11,25	10,87	10,20	11,46	11,32
3	Jawa Barat	9,57	8,77	7,83	7,25	6,82	8,43	8,11
4	Jawa Tengah	13,32	13,19	12,23	11,19	10,58	11,84	12,06
5	D.I.Yogyakarta	13,16	13,10	12,36	11,81	11,44	12,28	12,36
6	Banten	5,75	3,36	5,59	4,24	4,94	6,63	5,09

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2020 menempati posisi pertama sebagai provinsi yang memiliki persentase penduduk

miskin tertinggi di Pulau Jawa. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 6 tahun selalu berada diatas tingkat kemiskinan nasional hingga tahun 2020 masih tercatat sebesar 12,28% atau naik sebesar 0,84%. Sehingga angka tersebut masih diatas rata rata nasional sebesar 9,78%.

Secara umum, dalam mengurangi kemiskinan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pengaruh positif, hal ini dilihat dari angka persentase penduduk miskin yang semakin menurun. Akan tetapi, angka penurunan relatif lambat atau hanya sebesar 0,57% pertahun, penurunan ini terbilang rendah karena tidak mencapai 1 (satu) persen (Sari,2018). Menurut kepala Bapedda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Fakhruddin (2021), terjadi peningkatan tingkat kemiskinan dan ketimpangan khususnya kabupaten Gunung Kidul dan Kulon progo. Untuk melihat persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2020 (%)**

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Kulon Progo	21,40	20,30	20,03	20,30	17,39	18,01	20
2	Bantul	16,33	14,55	14,07	13,43	12,92	13,50	14
3	Gunung Kidul	21,73	19,34	18,05	17,12	16,61	17,07	18
4	Sleman	9,47	8,21	8,13	7,65	7,41	8,12	8
5	Kota Yogyakarta	8,75	7,70	7,64	6,98	6,84	7,27	8

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Tabel 1.2 menunjukkan Tingkat Kemiskinan yang diukur dengan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 6 tahun dimana kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo memiliki angka rata-rata persentase penduduk miskin diatas rata-rata angka nasional sedangkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta

dikategorikan tingkat kemiskinan rendah. Menurut kepala Bappeda DIY dalam Evani (2019), bahwa terdapat beberapa tantangan dalam mengurangi angka kemiskinan salah satunya akibat terjadinya *inclusion error* atau kesalahan pada penerimaan program. Dalam hal ini masyarakat yang tidak masuk kategori miskin tetapi menerima program pemerintah pengentasan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran perkapita. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan individu yang dikategorikan sebagai pengangguran juga sangat berkaitan dengan kemiskinan. Salah satu indikator pengukuran yang digunakan dalam sektor ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Ketenagakerjaan menjadi penyebab teradinya kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Mirah dkk, 2021).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap banyaknya jumlah penduduk serta untuk mengukur besar kecilnya produktivitas masyarakat (Pumamasari dkk, 2021). Ketimpangan terjadi jika peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Sehingga, akan menimbulkan

permasalahan pengangguran dan berujung pada permasalahan kemiskinan (Nanda, 2018).

Pada tahun 2015-2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada setiap Kabupaten/Kota di Povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami fluktuasi. Berikut ini merupakan tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2020 diikuti ke 4 Kabupaten dan 1 Kota yang berada di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta.

**Tabel 1.3 Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2020 (%)**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RataRata
Kab Kulon Progo	75,62	80,2	74,61	76,5	76,7	77,88	76,9
Kab Bantul	67,84	69,27	72,21	73,87	73,18	74,45	71,8
Kab Gunung Kidul	70,77	75,14	74,5	76,81	76,31	65,3	73,2
Kab Sleman	65,45	69,67	70,17	71,22	70,52	70,51	69,59
Kota Yogyakarta	66,7	71,05	65,72	69,33	69,75	68,62	68,53
DIY	68,38	71,96	71,52	73,12	72,72	71,12	

Tabel 1.3 merupakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2020. Kabupaten Kulon Progo jika dilihat dari tahun 2015-2020 memiliki rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan pola kerja masyarakat yang masih mengandalkan sektor agraris sehingga banyak penduduk yang terlibat aktif secara ekonomis walaupun pendapatan yang dihasilkan rendah. Sedangkan, Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2020 memiliki angka rata rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja paling rendah jika dibandingkan dengan ke-4 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan diperkotaan mengalami penurunan penawaran tenaga kerja. hal ini dikarenakan

sulitnya untuk masuk ke lapangan pekerjaan di wilayah perkotaan yang di domisili sektor formal dimana membutuhkan persyaratan tertentu (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pengangguran merupakan isu penting sehingga sangat kompleks untuk dibahas, karena berhubungan langsung dengan beberapa indikator salah satunya kemiskinan (Syafriana dkk, 2017). Hal ini karena semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan berdampak terhadap kemiskinan di daerah tersebut (Giovanni, 2018). Pengangguran menyebabkan seseorang tidak mendapatkan penghasilan, akibatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehingga seseorang hidup dibawah garis kemiskinan dan digolongkan penduduk miskin (Priyono dkk, 2018). Penyebab pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah Angkatan kerja yang tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Pengangguran menjadi masalah perekonomian karena berkurangnya pendapatan individu maupun produktivitas sehingga dapat menyebabkan masalah kemiskinan (Lelau A, 2013).

Masalah pengangguran juga dialami oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengangguran pada setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung tidak stabil. Tetapi, jika dilihat dari angka rata-rata pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah pengangguran yang cukup signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), adanya wabah Covid-19 tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi sektor ketenagakerjaan juga mengalami dampak negatif sehingga terjadi kenaikan angka pengangguran. Jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut..

**Tabel 1.4 Jumlah Pengangguran  
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2020**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Kulon progo	8.966	6.124	4.873	3.873	4.710	24.783	8.888
Bantul	15.309	10.324	17.466	16.118	18.080	8.591	14.315
Gunung Kidul	11.526	8.322	7.085	9.606	8.972	10.005	9.253
Sleman	32.167	23.491	23.173	30.294	27.508	35.843	28.746
Yogyakarta	12.277	8.765	11.422	15.071	12.212	22.624	13.729
D.I.Yogyakarta	80245	57036	64019	75032	71482	101846	

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam Tabel 1.4 terlihat bahwa Kabupaten Sleman mempunyai angka pengangguran tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 28.746 jiwa. Menurut Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam Lantiva (2021), pemerintah setempat sudah mengupayakan untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sleman dengan mengadakan program pelatihan melalui Balai Pelatihan Kerja (BPK) dan program padat karya. Disisi lain, Kabupaten Kulon Progo justru mempunyai angka pengangguran yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan ke-4 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Kulon Progo cukup baik dalam menyediakan lapangan pekerjaan (Diskominfo, 2020).

Kebijakan upah minimum juga menjadi usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, apabila kebutuhan dapat terpenuhi maka kesejahteraan tenaga kerja dapat meningkat (Febrianica,2014). Sehingga dalam upaya mengentaskan kemiskinan dapat melalui peningkatan pendapatan maupun produktivitas bagi pekerja sehingga dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan ketika pekerja tersebut termasuk dalam kategori miskin (Islami dkk, 2019). Menurut Badan

Pusat Statistik (2016), Upah Minimum Regional (UMR) adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan bisnis atau kerjanya. Peningkatan Upah Minimum Regional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut.

**Tabel 1.5 Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2020**

NO	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab Kulon Progo	Rp1.131.800	Rp1.268.870	Rp1.373.600	Rp1.493.250	Rp1.613.200	Rp1.750.500
2	Kab Bantul	Rp1.163.000	Rp1.297.700	Rp1.404.760	Rp1.572.150	Rp1.649.800	Rp1.790.500
3	Kab Gunung Kidul	Rp1.108.249	Rp1.235.700	Rp1.337.650	Rp1.454.200	Rp1.571.000	Rp1.705.000
4	Kab Sleman	Rp1.200.000	Rp1.338.000	Rp1.448.385	Rp1.574.550	Rp1.701.000	Rp1.846.000
5	Kota Yogyakarta	Rp1.302.500	Rp1.452.400	Rp1.572.200	Rp1.709.150	Rp1.848.400	Rp2.004.000

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat kenaikan Upah Minimum Regional di 4(empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) tahun terakhir. Pada tahun 2015-2020 Kabupaten Kulon Progo rata rata mengalami kenaikan upah minimum sebesar Rp.123.740 , Kabupaten Bantul rata rata mengalami kenaikan upah minimum sebesar Rp.125.500 Kabupaten Gunung Kidul rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp.119.350, Kabupaten Sleman rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp.101.000 dan Kota Yogyakarta rata rata mengalami kenaikan sebesar Rp.140.300.

Dalam Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfionika dkk (2021) yang berjudul "Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi" dengan menggunakan teknik analisis data panel memberikan hasil bahwa variabel pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Bersama sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara variabel pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mirah (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan kerja terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sulawesi utara” dengan Teknik analisis jalur (*Path Analysis*) bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja baik perempuan dan Laki laki berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sulawesi utara.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ningrum (2017) yang berjudul “Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia tahun 2011-2015” dengan menggunakan Teknik analisis data panel memberikan hasil bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk di Indonesia, sedangkan variabel Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk di Indonesia. Sama halnya penelitian terdahulu oleh Niswati (2014) yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2011” dengan menggunakan Teknik analisis data panel memberikan hasil penelitian bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan di lima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan variabel produktivitas

tenaga kerja, Pendidikan, kesehatan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di lima Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.

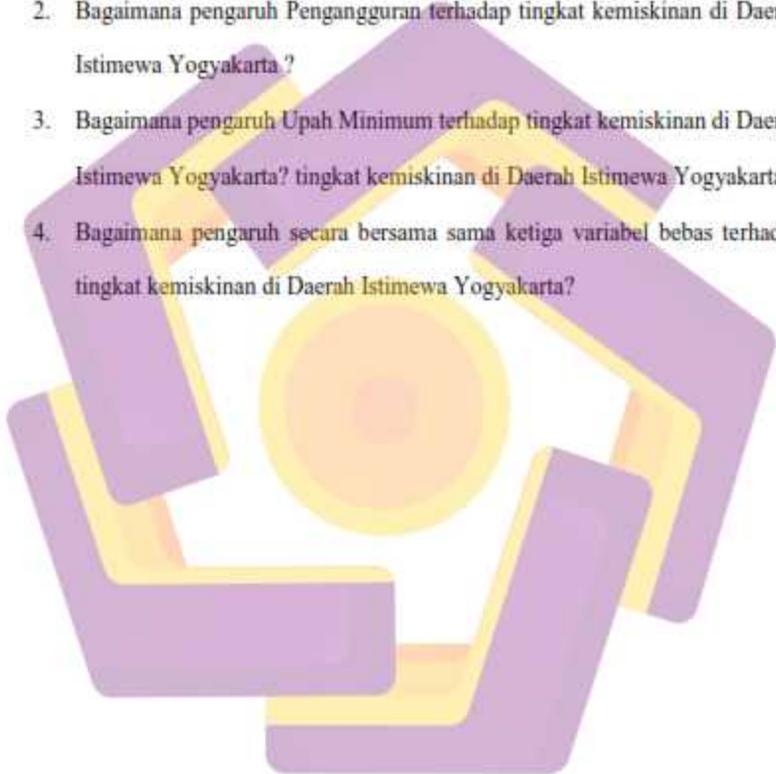
Beberapa faktor yang masih membuat angka kemiskinan masih tinggi diantaranya adalah upah minimum yang tergolong rendah, pengangguran yang tinggi dan kecilnya kesempatan lapangan pekerjaan (Niswan dkk,2021), sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa kemiskinan dipengaruhi beberapa faktor antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pengangguran dan Upah Minimum. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Sektor Ketenagakerjaan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”** .

## **1.2. Rumusan Masalah**

Permasalahan kemiskinan menjadi masalah pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Persentase penduduk miskin yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif masih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Masalah kemiskinan menjadi prioritas pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Berbagai program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan sudah banyak yang terlaksana. Ketimpangan terjadi jika peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Sehingga, akan menimbulkan permasalahan pengangguran dan berujung pada permasalahan kemiskinan, Kebijakan upah minimum juga menjadi usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, apabila kebutuhan dapat terpenuhi maka kesejahteraan

tenaga kerja dapat meningkat Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta? tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
4. Bagaimana pengaruh secara bersama sama ketiga variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?



### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk melihat pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk melihat pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk melihat pengaruh Upah Minimum Regional terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk melihat pengaruh jumlah ketiga variabel independent terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, manfaat penelitian sebagai berikut

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia ekonomi khususnya dalam subsektor ekonomi pembangunan dan menjadi landasan pengembangan dalam media pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan dan akademis dalam bidang ilmu ekonomi

#### 2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia ekonomi khususnya dalam subsektor ekonomi pembangunan dan menjadi landasan pengembangan dalam media pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan dan akademis dalam bidang ilmu ekonomi

#### 3. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Dengan adanya pembuatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk semakin rutin dalam memberikan program dan melakukan upaya pemenuhan kebutuhan warga negara secara layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam dunia ilmu pengetahuan ekonomi khususnya dalam sektor ketenagakerjaan, dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi dosen maupun mahasiswa sebagai rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Bagi peneliti lain

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh sektor ketenagakerjaan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 1.5. Sistematika Bab

Dalam penelitian ini terdapat lima (5) sistematika penulisan antara lain:

##### BAB I Pendahuluan

Meliputi latar belakang masalah terkait landasan pemikiran mengenai kemiskinan, pengangguran, upah serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja khususnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta; Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat penelitian mengenai Pengaruh Sektor Ketenagakerjaan terhadap Kemiskinan di D.Iogyakarta; dan Sistematika Bab.

##### BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada bab II ini berisikan landasan teori baik teori yang dikemukakan oleh para ahli maupun teori yang mendukung dan menguatkan penelitian ini. Selain itu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kerangka berfikir dan hipotesis atau dugaan sementara hasil penelitian.

##### BAB III Metode Penelitian

Dalam bab III ini menjelaskan dan memberikan gambaran tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, definisi operasional serta yang terakhir adalah Teknik analisis data.

#### **BAB IV Analisis dan Pembahasan**

Dalam bab IV ini membahas mengenai hasil analisis yang sudah dilakukan dengan memanfaatkan alat dan teknik analisis yang sudah direncanakan pada bab III serta memberikan kesimpulan serta pembahasan mengenai hasil yang sudah dianalisis.

#### **BAB V Penutup**

Berisikan kesimpulan mengenai hasil analisis dan saran bagi pihak terkait

